

# Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sariwangi Dengan Menggunakan Aplikasi Excel Sederhana

<sup>1)</sup>Ira Novianty, <sup>2)</sup>Iwan Setiawan, <sup>3)</sup>Dian Imanina Burhany, <sup>4)</sup>Yeti Aprilliawati, <sup>5)</sup>Etti Ernita Sembiring, <sup>6)</sup>Hendi Rohendi, <sup>7)</sup>Vina Citra Mulyandani\*, <sup>8)</sup>Arif Afriady, <sup>9)</sup>Rina Nurmalina

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Indonesia

Email Corresponding: [vina.citra@polban.ac.id](mailto:vina.citra@polban.ac.id)\*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Kata Kunci:</b> Dana Desa Badan Usaha Milik Desa Laporan Keuangan BumDes</p>	<p>Salah satu fokus pemerintah dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2024 adalah menegaskan peran penting BUMDes dalam mendukung Pembangunan di Tingkat lokal. Pemanfaatan dana desa untuk BUMDes di tahun 2024 tidak hanya sekedar mengalokasikan anggaran, tetapi harus bisa berkembang dan memiliki daya saing. Hal ini menuntut pengelolaan BUMDes yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dana BUMDes adalah melalui pelaporan keuangan. BUMDes harus memiliki laporan keuangan sesuai proses bisnis yang dijalankan oleh unit-unit usaha dalam BUMDes. Laporan keuangan ini akan menjadi salah satu alat evaluasi untuk memantau perkembangan dan kinerja keuangan BUMDes. Dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar dapat menjadikan BUMDes lebih produktif dalam menggunakan dananya dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat desanya. Desa Sariwangi merupakan salah satu desa binaan Polban yang telah memiliki BUMDes sejak tahun 2021. BUMDes di Desa Sariwangi memiliki dua unit usaha, yaitu unit usaha percetakan dan unit usaha perdagangan sembako. Alokasi Dana Desa akan terus diberikan kepada BUMDes pada tahun 2024 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomot 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Dalam Peraturan Menteri tersebut, salah satu fokus alokasi Dana Desa Tahun 2024 adalah pada permodalan BUMDes. Sejak digulirkannya Dana Desa kepada BUMDes mulai tahun 2021 sampai tahun 2023, BUMdes sama sekali belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangannya. Laporan Keuangan BUMDes di Desa Sariwangi belum pernah disusun. Hanya catatan sederhana yang dilakukan. Hal ini berdampak pada pelaporan Pemerintah Desa yang kurang lengkap karena alokasi dananya yang diinvestasikan pada BUMDes belum dilaporkan perkembangan aktivitas usahanya. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 136 tahun 2022 yang mengharuskan BUMDes membuat laporan keuangan lengkap pada setiap satu semester dan setiap tahunnya. Belum tersusunnya laporan keuangan pada BUMDes di Desa Sariwangi disebabkan keterbatasan kompetensi pengelola BUMDes dan belum adanya kebijakan akuntansi pada BUMdes tersebut. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pengelola BUMdes mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat laporan keuangan di unit usahanya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan bantuan aplikasi Microsoft excel.</p>
	<b>ABSTRACT</b>

**Keywords:**

Village Fund  
Village Owned Enterprises  
BumDes Financial Report

One of the government's focuses in using Village Funds for 2024 is to emphasize the important role of BUMDes in supporting development at the local level. Utilizing village funds for BUMDes in 2024 is not just about allocating a budget, but must be able to develop and have competitiveness. This requires transparent and accountable BUMDes management. One form of transparency and accountability of BUMDes funds is through financial reporting. BUMDes must have financial reports in accordance with the business processes carried out by business units within BUMDes. This financial report will be an evaluation tool to monitor the development and financial performance of BUMDes. Having financial reports that comply with standards can make BUMDes more productive in using their funds and optimize the welfare of their village communities. Sariwangi Village is one of the villages assisted by Polban which has had a BUMDes since 2021. BUMDes in Sariwangi Village has two business units, namely a printing business unit and a basic food trading business unit. Village Fund allocations will continue to be given to BUMDes in 2024 in accordance with Village Ministerial Regulation number 13 of 2023 concerning Operational Guidelines for the Focus of Use of Village Funds in 2024. In this Ministerial Regulation, one of the focuses of Village Fund allocations in 2024 is on BUMDes capital. Since the Village Fund was rolled out to BUMDes from 2021 to 2023, BUMDes has not submitted its financial accountability report at all. The BUMDes financial report in Sariwangi Village has never been prepared. Only simple notes do. This has an impact on the Village Government's reporting being incomplete because the allocation of funds invested in BUMDes has not been reported on the development of its business activities. This is not in accordance with the mandate of Village Minister Regulation Number 136 of 2022 which requires BUMDes to make complete financial reports every semester and every year. The financial reports for BUMDes in Sariwangi Village have not been prepared due to the limited competence of BUMDes managers and the absence of accounting policies for the BUMDes. The result of this Community Service activity is that BUMDes managers gain knowledge and skills in making financial reports in their business units in accordance with applicable financial accounting standards with helps microsoft excel.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## I. PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tentang Desa, perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa terus meningkat. Hal ini tercermin dari alokasi dana desa yang terus mengalami peningkatan. Pemerintah telah meningkatkan alokasi dana desa dari total senilai Rp 67,9 pada tahun 2023 menjadi Rp 71 triliun pada tahun 2024. Salah satu fokus penggunaan desa tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Desa No.13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, alokasi dana desa diutamakan untuk mendukung sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (2). BUMDes merupakan badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Walaupun bertujuan mencari keuntungan, bisnis yang dijalankan oleh BUMDes agak berbeda dari usaha murni yang dijalankan oleh sektor swasta. BUMDes menjadi salah satu elemen di desa yang membantu desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa. Oleh karena itu usaha pada BUMDes tidak sepenuhnya bertujuan mengejar keuntungan.

Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, BUMDes didirikan oleh satu Desa berdasarkan musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan Desa / dibawah ijin kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia (Kemenkumham ). Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian Desa melalui peningkatan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa. Sesuai amanat kepala Desa Sariwangi bahwa BUMDes harus menjadi lembaga unit usaha Desa yang bisa memberikan PADes (Pendapatan Asli Desa) demi terwujudnya Desa yang Mandiri.

Desa Sariwangi merupakan salah satu desa di Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang telah memiliki BUMDes sejak tahun 2021. BUMDes di Desa Sariwangi terdiri dari dua unit usaha, yaitu unit

usaha Percetakan dan unit usaha Perdagangan dan Jasa. Saat awal pendirian di tahun 2021, prioritas alokasi dana desa untuk BUMDes adalah investasi pada mesin percetakan. Selanjutnya pada tahun 2022 difokuskan pada sewa bangunan atau ruko. Pada tahun 2023, desa mengalokasikan danya untuk biaya operasional BUM Des, baik untuk produksi di unit percetakan maupun untuk unit perdangan barang-barang sembako.

Program prioritas BUMDes di Desa Sariwangi pada tahun 2024 ini akan meningkatkan unit usaha perdagangan sembako dengan program baru yang diberi slogan “Belanja Sambil Berdonasi”. Slogan ini mengandung makna bahwa keberadaan BUMDes diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi BUMDes itu sendiri, bagi kemandirian Desa Sariwangi, dan bagi masyarakat Desa Sariwangi yang kurang mampu. Hasil usaha atau laba dari perdagangan sembako tersebut akan dialokasikan 10% untuk dana sosial menyantuni fakir miskin, anak yatim yang ada dilingkungan Desa sariwangi. Dengan demikian, pemerintahan desa Sariwangi dapat memberikan bantuan bagi warga masyarakat. Dengan jumlah penduduk sebesar 12.000 kepala keluarga, dimana rata-rata 40% warganya berada pada tingkat perekonomian menengah ke atas, tentunya sangat berpotensi untuk menjadi pasar konsumen BUMdes dalam penjualan sembako. Jenis sembako yang dijual di Toko BUMDes Sariwangi terdiri dari beras premium, telur, isi ulang Gas 3 kg, gula pasir dan minyak goreng.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini tidak akan tercapai jika seluruh elemen pengurus desa tidak mampu membuat pelaporan seluruh aktivitas desa yang memadai. Penggunaan dana desa yang efektif dan akuntabel tidak terlepas dari proses pelaporan keuangan yang tertib dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini, alokasi dana desa yang ditujukan bagi pengembangan BUMDes tentu harus dlaporkan efektifitas penggunaan dananya. Hal ini menuntut BUMDes untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, yaitu laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, tepat waktu sesuai dengan panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes. Dengan disusunnya laporan keuangan secara periodik, BUMDes dapat mengetahui pertumbuhan usaha dan kinerja keuangan lainnya.

Sejak berdirinya BUMDes di Desa Sariwangi, pemerintah desa telah mengalokasikan dana desa kepada BUMDes sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi dana desa Sariwangi

Tahun	Uraian	Jumlah Alokasi Dana Desa
2021	Investasi untuk mesin percetakan	Rp 400.000.000
2022	Sewa gedung Ruko	Rp 100.000.000
2023	Tambahan modal untuk biaya produksi	Rp 75.000.000

Jumlah dana desa yang telah dialokasikan untuk mendorong usaha BUMDes sampai saat ini belum ada catatan pelaporan keuangan yang lengkap sesuai dengan amanah pada Peraturan Menteri Desa No. 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes. BUMDes dituntut untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangannya. BUMDes di Desa Sriwangi belum pernah membuat laporan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagai pihak yang mendanai usaha BUMDes. Hal ini menjadi penting karena berdampak pada pelaporan penggunaan Dana Desa tidak akuntabel mengingat Pemerintah Desa harus membuat laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah yang nantinya akan diaudit oleh BPK dan Inspektorat. Selain itu, Pemerintah Desa tidak mengetahui perkembangan usaha pada BUMDes nya dan tidak diketahui bagaimana kontribusinya pada Pendapatan Asli Desanya. Kegagalan usaha pada BUMDes sering terjadi akibat tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya (Rawintan, 2021) . Tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangan menyulitkan aparatur desa melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan atau kegagalan pada BUMDes (Pratiwi & Ira, 2020)

Topik penyusunan laporan keuangan pada BUMDes saat ini sangat relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pemerintah yang memfokuskan penggunaan dana desa tahun 2024 diutamakan untuk mendukung bantuan permodalan BUMDes sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada di desa. Alokasi dana desa pada BUMDes tentu saja harus diikuti dengan laporan

pertanggungjawaban atas penggunaan dananya. Alokasi dana desa melalui BUMdes dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang merata jika dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan akuntabel dan berkelanjutan (Yuliana,2022). Penyusunan laporan keuangan pada BUMdes ini dilakukan dengan aplikasi Microsoft excel.

Tujuan dari pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sariwangi dengan menggunakan Aplikasi Excel Sederhana adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMDes yang bisa dipantau dari laporan keuangan dengan aplikasi Microsoft excel; mengukur tingkat efektifitas alokasi dana desa kepada BUMDes apakah sudah sesuai dengan program kerja prioritas pada tahun 2024 ini; mengukur apakah dana desa yang telah dalokasikan kepada BUMDes memiliki kebermanfaatn yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan pengabdian Masyarakat sejenis juga dilakukan di Desa Kabawakole dengan kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (Hanifa et.al.,2022) yang menjadi pembeda dengan pengabdian sejenis adalah kami memanfaatkan teknogi informasi sederhana dengan menggunakan Microsoft excel dalam penyusunan laporan keuangannya.

## II. MASALAH

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mangamanatkan bahwa fokus penggunaan dana desa salah satunya diutamakan untuk permodalan BUMDes. Dana tersebut dialokasikan Pemerintah Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap pengelolaan BUMDes agar berkembang dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Selanjutnya dengan keberhasilan usaha pada BUMDes dapat mewujudkan desa yang mandiri.

Seiring dengan Permendes No 13 tahun 2023 tersebut, Desa Sariwangi telah mengalokasikan dana desa kepada BUMDes sejak tahun 2021 dengan total modal yang diberikan senilai Rp 575.000.000. Unit usaha BUMDes di Desa Sariwangi terdiri dari Unit Usaha Percetakan dan Unit Usaha Perdagangan dan Jasa.

Sampai saat ini dana yang ditujukan untuk mengembangkan kedua unit usaha itu belum pernah dilaporkan secara memadai. Catatan keuangan hanya dibuat seadanya dan masih jauh dari standar penyusunan laporan keuangan yang diwajibkan. Tidak adanya pelaporan keuangan pada BUMDes menyebabkan Pemerintah Desa Sariwangi belum mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Keberhasilan atau stagnasi usaha pada BUMDes Sariwangi
2. Jumlah dan pertumbuhan transaksi
3. Jumlah hasil usaha
4. Perkembangan aset
5. Pajak yang telah dibayarkan
6. Kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes)

Hal-hal diatas akan mudah diketahui jika BUMDes menyusun laporan keuangan setiap periodenya. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh BUMDes berdasarkan Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes (6) terdiri dari :

1. Laporan Laba Rugi
2. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

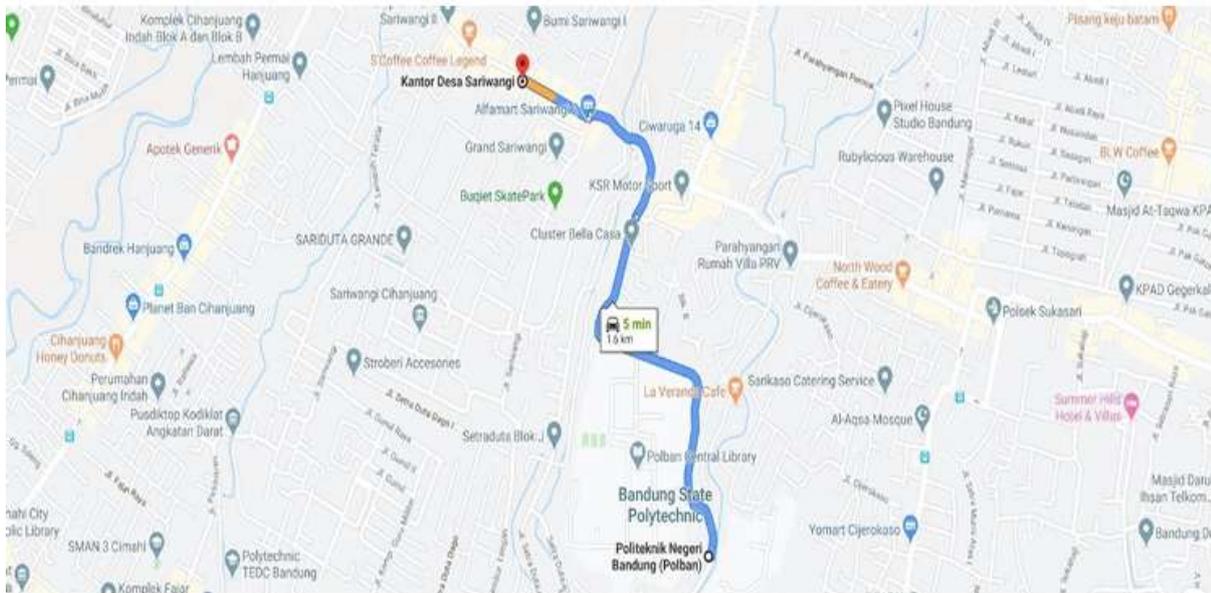
Laporan keuangan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengetahui maju mundurnya usaha, potensi kebangkrutan usaha, dan memberikan informasi tentang kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Laporan keuangan juga merupakan bentuk transparansi dalam menginformasikan perkembangan asset BUMdes. (Irawati,2017)

Proses penyusunan Laporan Keuangan BUMdes memerlukan kemampuan yang baik dalam memahami prinsip dan standar-standar akuntansi keuangan. Belum adanya pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pengelola BUMDes, kurangnya pelatihan teknis tentang penyusunan laporan keuangan,

dan belum dimilikinya Panduan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes. Sulitnya menyusun laporan keuangan juga umumnya disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang minim di bidang akuntansi (Arista et.al; 2021). Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi microsoft excel untuk memudahkan pengelola BumDes dalam mencatat setiap transaksi keuangan.

Tempat pelaksanaan PkM ini akan dilaksanakan di Kantor Desa Sariwangi beralamat di Jl. Sariwangi No. 205 Rt.01/08 Kecamatan Parongpong Kabupaten Barat, Jawa Barat 40559. Lokasi Desa Sariwangi berbatasan dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Bandung Barat. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karwawangi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cigugurgirang/Desa Ciwaruga, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Cimahi / Kota Bandung dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cihanjuang.

Berkut adalah gambar peta lokasi Desa sariwangi:



Gambar 2. Lokasi PKM Mitra

### III. METODE

Secara teknis, kegiatan pengabdian ke Desa Sariwangi ini terbagi kedalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap evaluasi pelaksanaan program kegiatan.

Tahap persiapan diawali dengan komunikasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sariwangi untuk mendapatkan informasi mengenai jenis pelatihan ataupun pendampingan yang diperlukan oleh Desa dan juga target peserta pelatihan. Selanjutnya teknis pelaksanaan pelatihan ini akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan aparat desa untuk menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan
2. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada aparatur desa mengenai rincian kegiatan pelatihan dan target yang diharapkan setelah melakukan kegiatan pelatihan ini.
3. Melakukan Forum group discussion untuk mendapatkan informasi mengenai unit-unit usaha BUMDes yang ada di Desa Sariwangi dan menggali proses bisnis yang telah dilakukan serta alokasi dana yang telah diberikan dari dana desa.
4. Melaksanakan pretest kepada pengelola BUMDes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes.
5. Memberikan pemaparan kepada pengelola BUMDes mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan BUMDes dan memberikan penjelasan jenis-jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh BUMDes.

6. Memberikan pelatihan/praktik bagaimana tahapan-tahapan penyusunan laporan keuangan BUMDes yang sesuai Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dengan bantuan aplikasi Microsoft excel.
7. Memberikan post test mengenai proses penyusunan laporan Keuangan BUMDes..
8. Memberikan feedback kepada peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini.
9. Meminta peserta untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan ini dan meminta saran untuk peningkatan kebermanfaatan kegiatan pengabdian selanjutnya. Keberhasilan dan kelancaran kegiatan pengabdian ini tidak lepas dari partisipasi aparat Desa Sariwangi sebagai mitra.

Motode pelatihan yang akan diberikan berupa:

1. Ceramah, yaitu dengan memberikan penjelasan kepada para pengelola BUMDes bagaimana menganalisis transaksi sampai dengan menyusunnya kedalam laporan keuangan BUMDes.
2. Diskusi interaktif, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada para pengelola BUMDes dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan dan bagaimana harus melakukan pencatatan dan pelaporannya. Diskusi juga memberikan pemahaman lebih mendalam kepada kami terkait proses bisnis yang dijalankan oleh BUMDes Sariwangi.
3. Studi kasus, yaitu dengan menggali lebih dalam tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes khususnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan.
4. Aplikatif, yaitu dengan mengaplikasikan langsung pada aplikasi yang telah disusun di Microsoft excel bagaimana transaksi yang ada di BUMDes diterapkan kedalam tahapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi di BUMDes Sariwangi.

Bentuk partisipasi yang diberikan mitra antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai kebutuhan di Desa Sariwangi sebagai masukan bagi kami dalam menyusun dan mengembangkan materi pelatihan yang dibutuhkan oleh mitra.
2. Memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi Desa Sariwangi terutama yang berkaitan unit-unit bisnis pada BUMDes Sariwangi dan proses bisnis yang telah dijalanckannya selama ini.
3. Membantu memberikan masukan mengenai lokasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan ini.
5. Memberikan masukan kepada kami mengenai jenis pelatihan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan desa.
6. Memberikan masukan kepada kami mengenai bagaimana metode
7. pencatatan/pembukuan yang selama ini dilakukan. Hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi para pengelola BUMDes dalam membuat pelaporan keuangan yang tansparan dan akuntabel.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sariwangi sangat diperlukan. Pelaksanaan PKM dengan tema penyusunan laporan keuangan Bumdes desa sariwangi terdiri dari dosen, mahasiswa dan peserta sebanyak 15 orang yang terdiri dari pengelola BumDes. Kegiatan PKM diawali dengan kata sambutan oleh kepala Desa Sariwangi dan ketua Tim PKM, perkenalan anggota PKM serta doa bersama menandai pembukaan secara resmi kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan Bumdes di desa Sariwangi.

Peserta kemudian menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh dosen-dosen akuntansi Politeknik Negeri Bandung terkait dengan jenis laporan keuangan BumDes, tahapan penyusunan laporan keuangan; kode akun, kode rekening dan persamaan dasar akuntansi, entry jurnal dan buku besar; Menyusun laporan laba rugi, neraca dan laporan perubahan ekuitas; Menyusun laporan arus kas dan CALK dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel. Pada tahap kedua, tim PkM melakukan pelatihan cara pencatatan transaksi yang benar menggunakan aplikasi microsoft excel. Penggunaan aplikasi microsoft excel memberikan kemudahan bagi pengelola BUMDes dalam menyusun laporan keuangan serta mudah dipahami pembaca oleh pengguna laporan keuangan (Hidayati et al., 2024). Selain itu, perangkat microsoft excel mudah diperoleh dan tidak membutuhkan biaya terlalu tinggi (Kusumawati et al., 2023). Berbagai

kemudahan ini membantu pengelola BUMDes dalam penyajian laporan keuangan. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan BUMDes dalam mencatat transaksi keuangan.



Gambar 2. Pemaparan materi penyusunan laporan keuangan BumDes

Kegiatan selanjutnya adalah peserta pelatihan melakukan praktik menyusun laporan keuangan BUMDes sesuai dari materi yang sudah disampaikan dengan pendampingan dari para dosen akuntansi dalam aplikasi Microsoft excel.



Gambar 3. Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes dengan aplikasi Microsoft Excel



Gambar 4. Menu penyusunan laporan keuangan BUMDes pada Microsoft Excel

Pengelola BUMDes diberikan pelatihan bagaimana menyusun laporan keuangan BUMDes menggunakan aplikasi Microsoft excel dengan cara menginput transaksi keuangan sehari-hari yang kemudian dimasukkan pada aplikasi sehingga dapat menghasilkan output berupa laporan keuangan.

Dalam program ini, tim PkM juga membuat satu modul penyusunan laporan keuangan yang dapat dijadikan pedoman dalam praktik sehari-hari. Modul yang dirancang untuk penyusunan laporan keuangan BUMDes menggunakan aplikasi Microsoft excel berisi menu daftar akun dan saldo awal, daftar hutang piutang, aktiva tetap, jurnal penyusutan, jurnal penyesuaian, buku besar, neraca, laporan harga pokok penjualan, laporan posisi keuangan. Modul ini akan memandu karyawan BUMDes dalam melakukan pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan.

Untuk melihat tingkat ketercapaian kegiatan pelatihan dilakukan penilaian kepada peserta melalui post test dan juga observasi. Untuk hasil observasi terhadap peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan serta mendengarkan dan terjadi diskusi selama proses pelaksanaan kegiatan pelatihan. Tim PKM

juga mengevaluasi secara lisan dengan mendengarkan pendapat peserta pelatihan dan mendapatkan hasil bahwa pelatihan penyusunan laporan keuangan BumDes dapat memberikan dampak dan menambah wawasan bagi peserta pelatihan.

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pengelola BUMDes yang mengikuti pelatihan mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan pemahaman karyawan yang cukup tinggi dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu sebesar 51%. Selain itu, terdapat peningkatan kemampuan karyawan dalam penggunaan Microsoft Excel dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu sebesar 40% dan peningkatan pemahaman terkait konsep dasar akuntansi, sebesar 25%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program PkM ini telah efektif meningkatkan pemahaman dan kompetensi karyawan BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan PKM ini dilakukan dengan cara:

1. Melihat dan mengkroscek tingkat keberhasilan kegiatan berdasarkan target luaran yang telah ditetapkan. Aparatur desa diharapkan memiliki tambahan pemahaman dan keterampilan mengenai proses penyusunan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel. Harapannya setiap semester dapat dihasilkan laporan keuangan BUMDes yang tepat waktu sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes. (Ana; 2021)
2. Melihat perkembangan kinerja keuangan BUMDes yang bisa dipantau dari laporan keuangan yang disusunnya dengan aplikasi Microsoft excel.
3. Mengukur tingkat efektifitas alokasi dana desa kepada BUMDes apakah sudah sesuai dengan program kerja prioritas pada tahun 2024 ini.
4. Untuk mengukur apakah dana desa yang telah dalokasikan kepada BUMDes memiliki kebermanfaatannya yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan realisasi program ini, maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa hasil kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pelatihan dan pendampingan dari para anggota PKM mengenai penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa dengan menggunakan aplikasi microsoft excel dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan, pemahaman dan kemampuan kepada pengelola BumDes mengenai penyusunan laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Bumdes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Arista D, Ayu Satyanovi V, Dwi Ayu Rahmawati L, Asri Hapsari A. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Bumdes Banyuanyar Berkarya Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2021 Dec 4;4(3):550.
- Bambang Haryadi. Pelatihan Dan Pendampingan Manajemen Keuangan Dan Laporan Keuangan Bumdes Sempurna Bangkalan.
- Erlina E, Sirojuzilam S. Efektivitas Penerapan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Bumdes Sistem Akuntansi Bumdes Berbasis Web. *Owner*. 2020 Feb 6;4(1):282.
- Hidayati, N., Mudrifah, M., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Rekonstruksi penyusunan laporan keuangan BUMDes berbasis SAK EMKM menggunakan excel for accounting. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 21(1), 37–58. <https://doi.org/10.36406/jam.v21i1.1324>
- Hanifa, et.,al (2022) Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Di Desa Kabawakole, *Jurnal pengabdian multidisiplin* , Vol 2 No 3 2022.
- Irawati D, Martanti De. Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis. Jember; 2017. 41–51 p.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.
- Kusumawati, I. R., Hidayaturrehman, M., & Dani, R. (2021). Peningkatan kesejahteraan ekonomi desa melalui optimalisasi pengelolaan Bumdes budidaya lele di Desa Patean Kecamatan Batuan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i2.87>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

- Posi Spamp. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Bumdes Berdasarkan Sak Etap.
- Pratiwi Mb, Novianty I. Prosiding The 11 Th Industrial Research Workshop And National Seminar Bandung. 2020;26–7.
- Rawintan Endas Binti Ryslamehnasmy. Digitalisasi Laporan Keuangan Bumdes Kayu Bawang. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Yuliana E, Alinsari N. Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. Owner. 2022 Jul 1;6(3):2789–99.